

**7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 1**

**Tabel VII.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman,Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>Meningkatnya tata kehidupan masyarakat Papua yang religius</b>	1. Mengintensifkan Komunikasi antara lembaga Keagamaan dengan pemerintah daerah dan antar umat beragama	Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan pembinaan	50 Lembaga	150 Lembaga	Pembinaan Umat Beragama	Kesbang Pol & Pemerintahan Dalam Negeri	Kesbang Pol & Dinas Sosial, Ro Mensprit,
		2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan.	Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan	150 Unit	350 Unit	Pembinaan Umat Beragama	Kesbang Pol & Pemerintahan Dalam Negeri	Kesbang Pol & Dinas Sosial, Ro Mensprit,
		3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial.	1. Jumlah Insiden yang disebabkan masalah perbedaan keagamaan 2. Tigkat pertemuan Lintas Agama dan Etnik	- insidental	- rutin dan berkelanjutan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbang Pol & Pemerintahan Dalam Negeri	Kesbang Pol & Dinas Sosial, Ro Mensprit,
2.	<b>Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya</b>	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dalam Pembangunan	Jumlah pembinaan bagi Lembaga Adat	5 kali	25 kali	Peningkatan Kerjasama Lembaga adat dan Pemerintah	Kesbang Pol & Pemerintahan Dalam Negeri	Kesbang Pol, Dinas Sosial, Ro Mensprit dan Dinas P&K
		2. Pemantapan Representasi Kultural Orang Asli Papua dalam Lembaga MRP	Jumlah pembinaan dan pelatihan bagi anggota MRP dalam bidang perencanaan dan keuangan daerah	-	10 kali	Peningkatan Kapasitas lembaga MRP & DPRP	Pemerintahan Dalam Negeri	Kesbang Pol & Sekretariat MRP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	<b>Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua</b>	1. Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan	Rendah	Tinggi	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesbang Pol	Kesbang Pol & Sekretariat MRP
			Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	-	Tinggi	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbang Pol	
			Jumlah masyarakat yang di Sosialisasi tentang Peraturan Hukum dan Perundang-undangan.	500 orang	2000 orang	Program Pengembangan Sadar Hukum		KesbangPol&Satpol PP, TNI, POLRI, Kejaksaan
4.	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua</b>	Mendorong Tumbuh Kembangnya Peran Lembaga Adat	Jumlah masyarakat adat yang diberikan pembinaan dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban	-	1000 orang	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbang pol	Dinas P & K, Bappeda, RoTapem
			Jumlah aktulisasi nilai-nilai hukum Adat	-	5	Peningkatan Kerjasama Lembaga Adat dan Pemerintah	Pemerintahan Umum Kesebang Pol	Badan Kesbang
			Jumlah Kajian tentang hukum adat dalam kebijakan daerah	-	5 kajian			Biro Hukum Ro Pemerintahan Kampung

## 7.2 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 2

### Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur</b>	1. Menyempurnakan system kepegawaian daerah, rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi dan peningkatan disiplin serta sistem Kinerja Aparatur.	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.	<60%	>70%	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	Pemerintahan Umum (tata Laksana), Kepegawaian.	BKPLA, RO Tata Laksana & PAN.
			Rata-rata Tingkat Kehadiran PNS dalam setahun.	<80%	100%			
			Jumlah SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama.	-	Semua SKPD			
			Jumlah SKPD yang telah menyusun laporan kinerja.	-	Semua SKPD			
		2. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional prosedur dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara konsisten.	Prosentase SKPD yang menerapkan SOP dan SPM	Dibawah 50%	Diatas 60%	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		BKPLA, RO Tata Laksana & PAN,

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah.	Disclaimer.	WTP	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.		BKPLA, RO Tata Laksana & PAN.
		4. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.	Jumlah temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti.	-	100%	Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.	Pemerintahan Umum (pengawasan).	Inspektorat.
2	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Tingkat sinkronisasi perencanaan daerah Provinsi dan Kab/Kota.	-	Baik	Perencanaan Pembangunan Daerah.	Perencanaan Pembangunan.	Bappeda.
			Tersedianya data dan informasi perencanaan daerah yang berkelanjutan	Ada	Ada dan berkesinambungan	Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan		
3.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi</b>	1. Peningkatan Sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah.	Jumlah unit pelayanan satu atap.	-	10	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik.	Pemerintahan Umum.	DPTIK, Bappeda, BPKAD.

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan serta Pemanfaatan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing Daerah.	Cakupan layanan Internet di SKPD.	60%	100%	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.		DPTIK, Bappeda, BPKAD.
4	<b>Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN</b>	Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku	Indeks Persepsi Korupsi			Peningkatan dan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Pemerintahan Umum (Hukum)	Ro Hukum, Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian
			Jumlah temuan pemeriksaan eksternal	-	Tidak ada			
			Jumlah Kasus KKN		Tidak ada			
5.	<b>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik</b>	Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen.	Tingkat Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Belum Konsisten	Konsisten	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Umum (Keuangan Daerah)	BPKAD, Bappeda
6.	<b>Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan</b>	Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatur melalui Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat		1.000 orang	Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Kepegawaian	BKPLA

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	<b>Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan</b>	Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SOTK	-	Semua SKPD	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pemerintahan umum (ORTAL)	
8.	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah</b>		Pelatihan Akuntabilitas Kinerja	-	Semua SKPD			Pemerintahan umum (ORTAL)
9.	<b>Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota</b>	Pembentukan dan berjalannya badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat	Tingkat kerjasama pembangunan antara Provinsi dan Kab/kota serta antar Kab/kota	-	Meningkat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintahan Umum & Perencanaan Pembangunan	DPRP dan Bappeda
10.	<b>Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat</b>		Terbentuk dan berjalannya BAKORWIL	-	Ada	Kerjasama Pembangunan		Bappeda, BPMK, Ro Tapem, Ro Pemkam
11.	<b>Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku).</b>		Tingkat kerjasama antara tiga tungku	Rendah	Tinggi	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung		Bappeda, BPMK, Ro Tapem, Ro Pemkam

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	<b>Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.</b>	Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP serta Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasusdan Perdasi serta mengawal Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten.	Jumlah Perdasus dan Perdasi yang ditetapkan/tahun	10	15	Kerjasama Pembangunan	Pemerintahan Umum (Hukum)	DPRP, Ro Hukum dan Bappeda
13.	<b>Rekonstruksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua).</b>	Penyusunan Rancangan UU Otsus Plus (UU Pemerintah Papua).	Tersusunnya rancangan UU Otsus Plus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pembangunan Papua.	-	Tersusun	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintahan Umum (Hukum)	Bappeda & Ro Hukum, RO Tapem
14.	<b>Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.</b>	Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.	Tingkat Perencanaan Program dan Kegiatan yang berfokus pada pemenuhan Hak Dasar Orng Asli Papua.	Belum Fokus	Fokus	Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Otonomi Khusus	Pemerintahan Umum (Hukum) & Perencanaan	Bappeda & Ro Hukum, RO Tapem

### 7.3 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 3

#### Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan.	Penyerasian Pengendalian Penduduk.	Angka Laju pertumbuhan penduduk.	5,3	Dibawah 3,0	Program Penataan administrasi Kependudukan.	Kependudukan.	Dinas Tenaga Kerja & Kependudukan; BPS.
			Ketersediaan dan keakuratan data penduduk	Belum akurat	Akurat			
		Revitalisasi Program KB	Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB	<50%	>60%	Program Keluarga Berencana	BKKBN	BKKBN, Dinas Kesehatan
			Presentase Poyandu yang melayani KB		90%	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.		
			Jumlah kampung yang mendapatkan informasi tentang KB	-	100 kampung mewakili masing-masing wilayah	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konselin KRR		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah remaja yang mendapatkan sosialisasi	-	1000 orang	Program Kesehatan Reproduksi remaja	Kesehatan	
<b>2.</b>	<b>Mewujudkan masyarakat religius</b>	Mendorong kemandirian peran lembaga keagamaan	Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan	50 Lembaga	150 Lembaga	Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Sosial	Dinkesos & Masyarakat terisolir; Biro Mental Spiritual; Kanwil Agama
			Jumlah bantuan sarana dan prasarana keagamaan	150 Unit	350 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas</b>	Pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan KAT	Jumlah KAT yang mendapat jaminan hidup (KK)	50	100	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinkesos & Masyarakat terisolir
			Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan	-	5000	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS		
			Jumlah permukiman serta infrastruktur yang tersedia bagi KAT (Unit)	-	100 unit			
			Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (jiwa).	150	300	Pembinaan Para Penyandang cacat		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi (jiwa)	150	500	Pembinaan Anak terlantar		
			Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi (jiwa)	100	200	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		
			Jumlah KAT yang dilayani oleh Pelayanan Khusus	-	1000	Layanan pendidikan khusus		
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	Memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan mendorong keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah Program yang secara khusus yang menangani Perempuan dan anak	-	50 Program	Keserasian Kebijakan Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Biro Pemberdayaan Perempuan; Seluruh SKPD; POLRI
			Jumlah SKPD dan Kab/kota yang difasilitasi ARG	-	30	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rasio KDRT	-		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.		
			Indeks Pembangunan Gender	61	63			
			Indeks Pemberdayaan Gender	55	60			
			Jumlah kelompok perempuan diberikan bantuan	-	100	Program Strategis Pembangunan Kampung (PROSPEK)	Pemberdayaan Masyarakat	BPMK & KK; Bappeda
			Jumlah kelompok perempuan yang terlatih	-	100	Peningkatan Peran Perempuan di Kampung		
			Jumlah SKPD dan Kab/kota yang difasilitasi perencanaan berbasis gender	-	50	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Daerah	Bappeda dan Biro Pemberdayaan Perempuan
5	<b>Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua</b>	Mempertahankan dan mengembangkan Budaya dan Seni Papua	Jumlah kegiatan pertunjukan kebudayaan	-	50	Pengembangan Nilai Budaya	Pendidikan	Dinas Pendidikan pemuda & olahraga; Dinas Kebudayaan & Pariwisata; Bappeda; BUMN; BUMD dan Dunia Usaha

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Rata-rata pengunjung Museum/bulan	-	50 Orang			
			Jumlah kelompok budaya			Pengelolaan Kekayaan Budaya		
			Jumlah Situs Budaya			Pengelolaan Keragaman Budaya		
			Jumlah masyarakat yang terlatih dalam pengembangan kreatifitas berbasis seni dan budaya	-	500	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Pariwisata	
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya prestasi olahraga</b>	Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional	Tingkat persiapan prasarana menjadi Tuan Rumah PON 2020	-	50%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga; DPU; BPN; KONI; Tim Persiapan PON
			Prosentase Cabang Olah Raga yang menjalankan Kompetisi secara teratur	60%	90%	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		
			Jumlah Atlet Daerah yang dikirim ke Iven Nasional dan Internasional					

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan minimal 1 cabang olah raga minimal 1 kali seminggu	30%	40%			
7.	<b>Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan</b>	Mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq	-	500	Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	BNN; Badan Kesbangpol
			Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	1000	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		
			Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan.	-	500	Pengembangan wawasan kebangsaan	Kesbangpol dalam negeri	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan minimal 1 cabang olah raga minimal 1 kali seminggu	30%	40%			
8.	<b>Terwujudnya masyarakat yang sehat</b>	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama dan sosial lainnya	Jumlah kader Posyandu		2000 orang	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah masyarakat yang memahami tentang Gizi	-		Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Jumlah Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam) beroperasi	-	3000	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Pemberdayaan Masyarakat Kampung	BPMK & KK
			Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	1000	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Prosentase keterlibatan perempuan dalam Posyandu	-	60%	Peningkatan Peran Perempuan		Dinas Kesehatan; RSUD Jayapura; RSUD Abepura;
		Mendekatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara merata diseluruh wilayah	Angka Kematian Bayi	35	21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kesehatan	Pendidikan, Pemuda & Olahraga; KPAD; Seluruh SKPD
			Cakupan Persalinan yang ditolong oleh Nakes terlatih	35%	>85%	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
			Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak balita	16	12	Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
			Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	1000	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	--	100%			Dinas Kesehatan; Perikanan dan kelautan; Pendidikan, Pemuda & Olahraga; Peternakan & Kesehatan Hewan;
			Cakupan Pemenuhan Obat diseluruh Puskesmas dan jaringannya	-	100%	Obat dan Perbekalan Kesehatan		Perindustrian &Perdagangan; Balai POM; Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; Mitra kerja pembangunan bidang kesehatan
			Cakupan pengawasan obat dan makanan	-	65%	Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	
			Persentase kampung yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	-	60%	Pengembangan Lingkungan Sehat		
			Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	1000	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		
						Obat dan Perbekalan Kesehatan		Dinas Kesehatan; RSUD Jayapura; RSUD Abepura; RSJ Abepura

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas dan KPS	100%	100%	Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	
			Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap Darurat	29 Kab/Kota	29 Kab/kota			
			Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED	<30%	>40%			
			Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	100%	100%	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		
			Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	1000	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terbangunnya Rumah sakit Rujukan	-	4 RS di empat wilayah	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/Rumah sakit paru/Rumah sakit mata	Kesehatan	Dinas Kesehatan; DPU; RSUD Jayapura; RSUD Abepura; RSJ Abepura; BKPLA
			Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan	-		Peningkatan SDM Kesehatan		
<b>9.</b>	<b>Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil</b>	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama	Tingkat peranserta lembaga-lembaga agama dalam pendidikan	-	Meningkat	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
		Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Angak Partisipasi Sekolah(APS) PAUD			Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
			Angka Partisipasi Murni (APM) (%) - SD - SMP	70,3 46,03	>80 >55	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Angka Partisipasi Murni (APM) (%) - SMA	32,45	>45	Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga; DPU; UNICEF
			Tingkat Kehadiran Guru	Rendah	Tinggi	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
			Prosentase Guru yang terakreditasi	-	80%			
			Prosentase pemenuhan bahan bacaan		100%	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah; Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
			Jumlah penerima beasiswa S1, S2 dan S3		500 orang	Akselarasi dan Afirmasi pendidikan Papua	Pendidikan	BPSDM Papua; Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga
			Prosentase Melek Huruf > 15 th	75,81	>90	Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Mendorong pengembangan dan pemanfaatan IPTEK	Jumlah kader pemuda yang mendapatkan pelatihan		300 orang	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga; BPMK & KK; BPSDA & Lingkungan Hidup; DPTIK;
			Jumlah kampung yang mendapatkan bantuan TTG	-	100 kampung percontohan	Pengembangan dan pemanfaatan TTG Teknologi	Pemberdayaan Masyarakat	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah penelitian TTG tentang Lingkungan Hidup	-	5	Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan	Lingkungan Hidup	Disperindakop& UKM; Dinas Pertambangan dan Energi; DPU; Bappeda; BPSDM; DRD; Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi
			Penerapan TTG pertanian		5	Peningkatan Penerapan Teknologi	Pertanian	
			Penerapan TTG Peternakan	-	5	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		
			Jumlah TTG yang mendukung Perindagkop	-	5	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Perindustrian	
			Jumlah kajian pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan	-	5	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Energi dan SDM	

**7.4 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4**

**MISI 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Terwujudnya iklim investasi yang kondusif</b>	1. Menyiapkan prosedur, perijinan investasi	Tingkat Investasi Daerah	Rendah	Meningkat	Prog. Peningkatan promosi dan kerjasama investas	penanaman modal	BKPM, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Hukum, Dinas Perhubungan, Dinas PU
		2. mengembangkan sistem promosi dan peluang investasi daerah						
		3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung investasi	Jumlah penerapan Pelayanan 1 Pintu	-	5	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana	penanaman modal	BKPM, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Hukum, Dinas Perhubungan, Dinas PU
		4. Menyediakan Regulasi pendukung investasi	Jumlah regulasi yang diterbitkan		3			
2.	<b>Tercapainya stabilitas makro ekonomi</b>	Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningk. kegiatan ekonomi	Tingkat Perlindungan Konsumen	Rendah	Meningkat	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Perindagkop, Bank Indonesia
			Nilai ekspor Daerah	<10T	>50 T	Peningkatan dan Pengembangan ekspor		
			Tingkat Inflasi Daerah	Tinggi	Rendah	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	<b>Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK</b>	Mendorong tumbuh dan berkembangnya produktivitas koperasi dan UKMK	Jumlah UKMK			Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Industri	Perindagkop& UKM, BPMK & KK
			Jumlah Wirausaha Baru	-	1.000 Wirausaha baru	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah		
			Tingkat pengembangan UKMK	-	Meningkat	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah		
			Jumlah koperasi yang mandiri	-	100 koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		
4.	<b>Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil &amp; menengah</b>	Mendorong produktivitas industri kecil dan menengah	Jumlah UKMK			Pengembangan industri kecil dan menengah	Industri	Perindagkop& UKM, BPMK & KK
			Terbentuknya sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan	-	100 sentra	Pengembangan sentra-sentra industri potensial		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah	Revitalisasi dan reorganisasi BUMD	Tingkat BUMD yang mandiri	-	100%	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		BUMD/Perindagkop & UKM, Dispenda
6.	BUMD/Perindagkop & UKM, Dispenda	1. Pembukaan dan perluasan lap. Kerja	Angka Pengangguran			Peningkatan kesempatan kerja	Ketenagakerjaan	Disnaker dan kependudukan, BLK
			Persentase penduduk yang bekerja terhadap total penduduk					
			Jumlah Angkatan Kerja yang terlatih		5000 orang			
		2. Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Tingkat Produktivitas tenaga Kerja	-	Meningkat	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
		3. Penyediaan peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peraturan tentang ketenagakerjaan	-	3 aturan			
7.	Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah	Revitalisasi fungsi lembaga promosi pariwisata	Tingkat kedatangan wisatawan	-	Meningkat	pengembangan pemasaran pariwisata	Kepariwisata	Dinas Pariwisata & Kebudayaan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Destinasi Pariwisata	-	50 destinasi	pengembangan destinasi pariwisata		
8.	<b>Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat</b>	Mendorong pertumbuhan wilayah2 strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah shg dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakkan wilayah tertinggal	Laju pertumbuhan produksi pertanian	-	10%	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Pertanian	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, Dinas perkebunan & peternakan, Dinas perikanan& kelautan, BPMK & KK
			Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan	-	10%	Peningkatan Ketahanan Pangan		
			Peningkatan produksi peternakan dan perikanan	-	10%	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah tenaga penyuluh			Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan lapangan		
9.	<b>Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat</b>	Mengembangkan usaha pemanfaatan kayu, pengembangan industri kayu rakyat, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan hutan	-	100 kelompok	Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Kehutanan	Dinas Kehutanan & Konservasi, BPMK & KK, Dinas Perindagkop & UKM
		Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan	Jumlah KPH	-	10 KPH	Pengembangan kesatuan pengelolaan hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan & Konservasi, BPMK & KK
		mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan	Nilai produksi hasil hutan			Pemanfaatan hasil hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan & Konservasi, Dinas Perindagkop & UKM, BPMK & KK

**7.5 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 5**

**Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapatkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Meningkatnya konektivitas antar wilayah</b>	Pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah	Panjang jalan yang dibangun		50.000 Km	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang Jembatan yang dibangun		500 Km Eq			
			Panjang jalan yang ditingkatkan		30.000 Km	Peningkatan Jalan dan Jembatan		
			Panjang Jembatan yang ditingkatkan		250 Km Eq			
			Panjang jalan yang direhabilitasi			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
			Panjang Jembatan yang direhabilitasi					
			Rasio jaringan irigasi			Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
			Penambahan Penyediaan Air baku			Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah KK yang terakses Air Bersih	-	1000 KK	Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
			Jalan Kampung yang terbangun			Pembangunan Infrastruktur Kampung		
			Peningkatan pelayanan transportasi antar moda	-	Meningkat	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	80%	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		
2.	<b>Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah</b>		Prosentase kab/kota yang terakses jaringan komunikasi	80%	100%	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Telekomunikasi	
3.	<b>Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah</b>		Cakupan akses terhadap komunikasi daerah	-	100%	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah dermaga perikanan tangkap			Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap		
			Jumlah kawasan permukiman yang layak	-	500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum, Dinas Kesos BPMK & KK Dinas Nakerduk
			Jumlah rumah yang terbangun	-	13.000 rumah	Pembangunan Rumah Layak Huni		
4.	<b>Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni</b>	Mempercepat Pembangunan Pemanfaatan energi murah dan ramah lingkungan, Rumah layak huni serta Sarana Prasarana air bersih.	Jumlah rumah yang terbangun	-	13.000 rumah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan	
5.	<b>Meningkatnya ketersediaan air bersih</b>		Cakupan kampung yang terkses Air Bersih		60%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	<b>Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan</b>		Cakupan Kampung yang mendapatkan listrik		60%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Energi dan SDM	
			Jumlah pengembangan energy terbarukan		3 Unit	Pengembangan dan Pemanfaatan energi Baru Terbarukan		
7.	<b>Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten</b>	Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah yang mendapatkan sosialisasi tentang Tata ruang			Pembinaan penataan ruang	Penataan Ruang	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Konservasi BPSDA & LH;
			Prosentase Kab/kota yang memiliki RTRW			Perencanaan Tata Ruang		BPN; DKP; Dinas Pertanian dan KP; Dinas Perkebunan; DPE; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW			Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda
			Jumlah pelanggaran terhadap penggunaan tataruang			Pengawasan Penataan Ruang		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Papua sebagai paru-paru dunia	Penurunan emisi GRK dan peningkatan serapan GRK	Tersedianya RAD GRK	-	1 RAD	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda; Dinas Pertanian; Dinas Kehutanan dan Konservasi; DPE; Dinas Perhubungan; DPU
						Pengembangan Pertanian Berkelanjutan	Pertanian	
			Jumlah Areal Hutan yang di rehabilitasi	-	15.Ha	Rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	
			Luas Hutan Gambut yang lestari			Pengelolaan Gambut		
			Kajian tentang energy terbarukan	-	5 kajian	Pengembangan Energi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Energi dan Sumberdaya Mineral	
		Membangun Green Investment	Kajian tentang Investasi Hijau			Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda; BKPM; Dinas Perkebunan; BPSDA&LH;
			Jumlah Investasi Hijau			Pengembangan Investasi Hijau	Penanaman Modal	Dinas Pertanian; Dinas Pariwisata
			Jumlah Investasi Hijau di bidang Perkebunan			Pengembangan Investasi Hijau	Perkebunan	
			Jumlah pengembangan ekowisata			Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Lingkungan Hidup	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Investasi Hijau di bidang Pertanian			Pengembangan Investasi Hijau	Pertanian	
		Peningkatan kualitas lingkungan	Jumlah kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	BPSDA&LH; Dinas Kehutanan dan Konservasi; Dinas Pertanian; DPU; Dinas Pekerjaan Umum; DKP
			Luas Lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan			Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
			Prosentase Peningkatan akses informasi Sumber daya air dan lingkungan Hidup			Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		
<b>9.</b>	<b>Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan</b>	Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan				Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda; BPSDA & LH; DKP; DPE
						Pengawasan Penataan Ruang		
						Pengembangan Sistem Perizinan Lingkungan	Lingkungan Hidup	
						Peningkatan Kapasitas		
						AMDAL		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Kelautan dan Perikanan	
						Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut		
						Penegakan Hukum		
						Pengawasan		
						Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Energi dan Sumberdaya Mineral	
						Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yang Berpotensi Merusak Lingkungan		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	Pengarutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan	Peningkatan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan				Pengembangan Kapasitas Pemerintah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda; Dinas Kehutanan dan Konservasi
						Pengembangan Kapasitas Pemangku Kepentingan		
						Pembangunan Kampung		
						Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Kehutanan	
		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana				Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Pemerintahan	BPBD, DKP
						Mitigasi Bencana		
						Kesiapsiagaan Bencana		
						Peningkatan Mitigasi Bencana Laut	Kelautan dan Perikanan	

